

PEMBINAAN PETANI PEKEBUN KELAPA SAWIT

Adlin U. Lubis dan Daswir

ABSTRAK

Pengembangan kelapa sawit di Indonesia terutama kelapa sawit rakyat pola PIR maupun swadana cukup pesat, baik dalam peningkatan luas areal maupun produksi. Hasil penelitian usahatani di beberapa sentra pengembangan kelapa sawit rakyat menunjukkan bahwa respons petani terhadap penerimaan introduksi paket teknologi kultur teknis tanaman berbeda-beda. Petani yang berlatar belakang pekerjaan pertanian ternyata lebih baik dibandingkan yang bukan berlatar belakang non pertanian. Di samping itu terlihat bahwa pengelolaan dengan cara kelompok kolektif murni lebih baik dari kelompok non kolektif. Berdasarkan data tersebut dan informasi kualitatif maka diajukan beberapa alternatif pengembangan usahatani, di antaranya dengan meningkatkan peran serta penyuluhan yang profesional dan cara pengadaan dana.

Kata kunci : kelapa sawit rakyat

PENDAHULUAN

Dalam GBHN 1993-1998 disebutkan bahwa pembangunan pertanian ditujukan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani. Khusus untuk pembangunan perkebunan diarahkan untuk meningkatkan ekspor dan memenuhi kebutuhan industri dalam negeri. Hal ini harus didukung oleh peningkatan ilmu pengetahuan, teknologi dan penyuluhan serta penyediaan sarana dan prasarana (5).

Pada Repelita VI perluasan areal perkebunan, terutama komoditas kelapa sawit akan tetap dilanjutkan. Setiap rencana pembukaan areal baru dan rehabilitasi perkebunan dilaksanakan dengan pola perusahaan inti rakyat (PIR) dan pola swadana dengan mengikut sertakan perkebunan negara dan perkebunan besar swasta nasional melalui pengembangan koperasi petani perkebunan.

Pada akhir tahun 1994 perkem-

bangun areal kelapa sawit di Indonesia telah mencapai 1.804.149 ha di antaranya seluas 575.544 atau 31,73% adalah perkebunan kelapa sawit milik rakyat (3). Dengan demikian peranan perkebunan kelapa sawit rakyat tidak dapat diabaikan begitu saja. Hal ini disebabkan menyangkut kehidupan petani kelapa sawit dan merupakan penciptaan lapangan kerja baru.

Dengan demikian tujuan pembangunan sub sektor perkebunan, khususnya komoditas kelapa sawit tidak saja untuk mencapai peningkatan produksi tetapi juga merupakan upaya penanganan non teknis terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Tulisan ini mengemukakan hasil penelitian mengenai perubahan yang terjadi sebagai indikator ekonomi di daerah pengembangan PIR-BUN kelapa sawit, seperti keterampilan, penyerapan tenaga kerja, pengelolaan dan pendapatan petani.

PERKEMBANGAN LUAS AREAL DAN PRODUKSI

Di Indonesia komoditas kelapa sawit adalah salah satu komoditas sub sektor perkebunan yang merupakan komoditas ekspor andalan non-migas dan pengembangannya dilaksanakan agar dapat membantu usaha perkebunan rakyat. Selama kurun waktu 25 tahun terakhir, perkebunan kelapa sawit terus berkembang dari areal seluas 133.298 ha pada tahun 1970 menjadi 1.804.149 ha pada akhir tahun 1994. Sekitar 31,73% atau 572.544 ha dari luas areal merupakan areal yang dikembangkan melalui pola PIR-BUN dan swadana dari masyarakat. Pada akhir tahun 1995 luas areal kelapa sawit Indonesia akan mencapai 1.951.609 ha. Sedangkan perkebunan rakyat akan mencapai 656.088 ha atau 33,62% dari luas areal kelapa sawit Indonesia. Sejalan dengan peningkatan luas areal tersebut, produksi minyak kelapa sawit rakyat pada tahun 1995 diperkirakan akan mencapai 1 juta ton (Tabel 1).

Diperkirakan pada akhir 1995 sebanyak 350.000 kepala keluarga (KK) atau \pm 1,75 juta jiwa hidup dari perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh PTP dan swasta. Khusus untuk perkebunan kelapa sawit pola PIR-BUN dan swadana, dapat diserap tenaga kerja sekitar 286.000 KK atau \pm 1,4 juta jiwa secara langsung.

Perkembangan kelapa sawit berawal di Sumatera Utara, Aceh dan Lampung, sejak pertengahan Pelita III sampai dengan sekarang telah dikembangkan dengan pola PIR-BUN ke 12 propinsi lainnya di Indonesia, tercakup Riau, Kalimantan, Sulawesi dan Irian Jaya. Pengembangan kelapa sawit dengan pola PIR-BUN dan swadana yang paling luas di Riau, seluas 126.269 ha (22,05%) disusul Kalimantan Barat

seluas 104.626 ha (18,27%), kemudian Sumatera Utara seluas 88.201 ha (15,41%). Pengembangan di propinsi lainnya masih di bawah 80.000 ha (Tabel 2).

Tabel 1. Luas areal dan produksi perkebunan rakyat

Tahun	Luas (ha)		Produksi (ton)		Perk. rakyat (%)	
	Indonesia	Rakyat	Indonesia	Rakyat	Areal	Prod.
1979	260.939	3.125	641.240	760	1,20	0,12
1983	405.646	37.043	982.987	37.043	9,13	3,77
1988	862.859	196.279	1.713.335	156.148	22,74	9,11
1993	1.613.187	502.332	3.421.449	582.021	31,14	17,01
1994	1.804.149	572.544	4.008.062	839.334	31,73	20,94
1995	1.951.609	656.088	4.350.084	1.004.254	33,62	23,08

Direktorat Jenderal Perkebunan dan PPKS, 1994 (2)

Tabel 2. Luas areal perkebunan rakyat menurut daerah pada tahun 1994

Propinsi	Indonesia	Perkebunan rakyat	
	ha	ha	%
Aceh	131.865	27.280	4,76
Sumatera Utara	541.978	88.201	15,41
Sumatera Barat	87.129	14.150	2,47
Riau	402.479	126.269	22,05
Jambi	124.873	80.528	14,06
Sumatera Selatan	140.057	59.364	10,37
Bengkulu	31.749	6.716	1,17
Lampung	25.398	897	0,16
Jawa Barat	14.795	6.296	1,10
Kalimantan Barat	170.543	104.626	18,27
Kalimantan Tengah	16.752	5.721	1,00
Kalimantan Selatan	16.269	0	0,00
Kalimantan Timur	34.437	19.818	3,46
Sulawesi Tengah	9.970	5.970	1,04
Sulawesi Selatan	44.186	18.708	3,27
Irian Jaya	11.669	8.000	1,40
Total	1.804.149	572.544	100

Direktorat Jenderal Perkebunan dan PPKS, 1994 (2)

PEMBINAAN PETANI

Pra konversi

Pola pengembangan sub sektor perkebunan ditujukan untuk mewujudkan perpaduan antara usaha dengan sasaran perbaikan kondisi sosial ekonomi petani peserta. Pola tersebut harus didukung oleh berbagai kegiatan produksi, pengolahan dan pemasaran dari perusahaan perkebunan besar sebagai inti dalam suatu sistem kerja sama yang saling menguntungkan. Keterlibatan perusahaan besar sebagai pelaksana inti terbatas sampai dengan tanaman menghasilkan dan laik konversi (semasa pembangunan kebun). Perusahaan perkebunan besar berperan sejak konversi sampai dengan setiap peserta tersebut dapat melunasi kreditnya dan selanjutnya secara terus menerus menjadi mitra kerja dengan petani peserta.

Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan antara petani yang langsung menekuni bidang pertanian serta latar belakang pekerjaan dengan penguasaan dan penerapan kultur teknis tanaman oleh petani. Petani yang langsung menekuni bidang pertanian lebih tinggi pendapatannya dibandingkan dengan petani yang tidak langsung menekuni bidang pertanian, demikian juga penguasaan dan penerapan kultur teknis tanaman yang dintroduksikan lebih baik. Petani yang berlatar belakang pekerjaan pertanian, baik petani tanaman semusim maupun tanaman tahunan lebih tanggap dalam penerimaan introduksi paket teknologi kultur teknis tanaman dibandingkan yang berlatar belakang pekerjaan non pertanian (1).

Pasca konversi

Pada pasca konversi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan

pengelolaan tanaman, produksi dan pemasaran menjadi tanggung jawab petani dan kebun inti serta KUD. Kebun inti dan KUD hanya melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap petani plasma.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 2 sistem kelompok yaitu kelompok non kolektif dan kolektif. Bervariasinya penguasaan teknologi antar petani, berpengaruh terhadap produksi dan pendapatan petani. Untuk mengatasi hal ini dianjurkan kepada petani untuk melaksanakan sistem kolektif murni yaitu petani dibina dalam suatu kelompok untuk mengelola kebunnya. Dengan demikian petani yang menguasai kultur teknis tanaman dapat membina petani yang kurang menguasai kultur teknis tanaman. Dengan cara kolektif, pengelolaan kebun seperti perawatan tanaman dan pemanenan serta perawatan jalan dan sebagainya lebih baik dari pada petani non kolektif. Pada akhirnya diperoleh rerata produksi petani kolektif lebih tinggi 33% dibandingkan dengan petani non kolektif (2).

Kelebihan lain dari kelompok petani kolektif adalah pembinaannya lebih mudah, kelompok usahanya lebih mantap, pemeliharaan tanaman, panen dan pemasaran hasilnya lebih efisien. Hal ini dikarenakan mereka lebih merasa senasib dan sepenanggungan. Lebih jauh lagi dengan cara kolektif ini akan mengurangi resiko pencurian produksi karena merasa milik bersama dan saling menjaga untuk kepentingan kelompoknya.

Pasca pelunasan hutang

Setelah pasca pelunasan hutang tidak ada peraturan yang mengikat perkebunan inti dengan plasma, sehingga tidak ada lagi keterlibatan pe-

rusahaan sebagai pembina. Peranan perusahaan inti masih berjalan sejak konversi sampai dengan setiap peserta melunasi kreditnya. Selanjutnya akan menjadi mitra kerja dari petani peserta. Setelah petani menerima sertifikat hak milik kebun plasma, kemungkinan akan terjadi pengalihan hak kepada orang lain. Pengelolaan kebun oleh pemilik yang baru ini kemungkinan tidak lagi menurut kultur teknis yang sebenarnya.

Atas dasar penelitian tersebut maka produktivitas kelapa sawit rakyat di Indonesia diharapkan tidak terlalu rendah.

Hasil survei PORIM 1983-1988 (4) di Malaysia menunjukkan produktivitas kelapa sawit yang dikelola dalam bentuk FELDA, FELCRA dan RISDA masing-masing 17,1, 14,8 dan 9,5 ton TBS/ha, sedangkan kebun rakyat yang tidak dikelola oleh FELDA, FELCRA dan RISDA hanya mencapai 12,7 ton TBS/ha. Tingkat produksi ini sangat rendah jika dibandingkan dengan rerata produksi perkebunan besar di Malaysia, yaitu 18,1 ton TBS/ha. Gejala ini sudah mulai kelihatan di beberapa lokasi di Indonesia sehingga perlu diantisipasi se-segera mungkin.

Berdasarkan hal tersebut di atas perkebunan rakyat di Malaysia dan juga di Indonesia sejak dari pra konversi sampai dengan pasca konversi dan pasca pelunasan hutang, alih teknologi yang telah ditransfer kepada petani plasma harus disertai penyuluhan yang berkesinambungan agar usahatannya dapat berjalan secara berkesinambungan. Dengan demikian upaya pengembangan petani perkebunan rakyat melalui pola PIR-BUN, adalah meningkatkan kualitas sumberdaya keluarga petani dengan cara merubah sikap yang statis, apatis, partisipasi pasif, pandangan sempit (6).

PENYULUHAN DAN PEMBIAYAAN

Untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas sumber daya petani tersebut diperlukan keterlibatan banyak pihak. Pihak-pihak dimaksud antara lain kelompok penyuluhan yang bekerja secara intensif dan berkesinambungan untuk meningkatkan peranan Koperasi Unit Desa (KUD) dan kelompok tani dalam pengadaan sarana produksi, pemasaran dan pembinaan petani untuk tidak konsumtif.

Untuk ini diperlukan kelompok penyuluh yang profesional dan dana yang cukup besar. Pada saat ini calon penyuluh cukup banyak tersedia terutama Sarjana Pertanian yang baru menyelesaikan pendidikannya. Yang menjadi masalah adalah penyediaan dana untuk gaji dan tunjangan sosial penyuluh. Pemerintah dalam hal ini sudah cukup banyak memberi bantuan sehingga tidak perlu dibebani lagi. Kesadaran ini hendaknya dapat ditumbuhkembangkan melalui koperasi, misalnya dengan cara memotong hasil penjualan TBS rakyat sebesar Rp 1,10/kg TBS rakyat seperti yang disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Contoh perincian biaya untuk penyuluh dan penarikan iuran dari produksi TBS rakyat

No.	Uraian	Volume
1.	Luas areal perkebunan rakyat (ha)	656.088
2.	Produksi CPO rakyat 1995 (ton)	1.000.000
3.	Produksi TBS rakyat 1995 (juta ton)	5.000.000
4.	Kemampuan penyuluh (ha)	1.000
5.	Penyuluh yang dibutuhkan (orang)	656
6.	Gaji penyuluh/orang/bulan (Rp)	750.000
7.	Kebutuhan/tahun/orang (Rp)	9.000.000
8.	Kebutuhan biaya 656 penyuluh (Rp)	5.894.000
9.	Iuran setiap kg TBS dari produksi rakyat (Rp)	1,10

KUD dapat ikut berperan serta dalam hal menstabilkan pendapatan petani dan menghindarkan petani dari hidup konsumtif. Petani disadarkan agar menabung di masa panen puncak atau harga tinggi dan petani dianjurkan untuk menabung di koperasi atau bank. Pada waktu produksi menurun atau harga turun, petani dapat mengambil simpanannya dengan demikian kebutuhan petani sekeluarga setiap bulannya terpenuhi.

Sebagai tindak lanjut dari masalah yang dikemukakan di atas maka perlu :

- a) menginventarisasi dan menetapkan lokasi perkebunan rakyat berdasarkan status kepemilikannya.
- b) meningkatkan kesadaran petani dengan wawasan tentang pengertian Agribisnis dan Agroindustri.
- c) meningkatkan peran KUD dan kelompok tani agar lebih profesional dan berorientasi pasar.
- d) menghimbau pemerintah agar pembinaan petani dapat dikelola secara profesional.

KESIMPULAN DAN SARAN

- a) Pendapatan usahatani peserta yang berlatar belakang pertanian lebih tinggi dibandingkan dengan petani berlatar belakang pekerjaan non pertanian.
- b) Sistem kelompok tani sudah diterapkan oleh petani plasma pola PIR-BUN, meskipun masih ada penerapan non kelompok tani. Sistem kelompok

tani ini sangat baik dalam hal penyerapan alih teknologi dan teknologi baru.

- c) Koperasi/KUD yang diharapkan dapat meningkatkan fungsi para pelaku ekonomi yang bertugas menangani masalah simpan pinjam ternyata belum banyak berperan.
- d) Perlu ditingkatkan ilmu pengetahuan petani kelapa sawit penyuluhan dengan berbagai media yang tepat guna dan efektif perlu ditingkatkan. Pembiayaan untuk para penyuluh disarankan dibiayai dari pemotongan hasil penjualan TBS rakyat yaitu sebesar Rp 1,10/kg TBS.

DAFTAR PUSTAKA

1. DASWIR dan DJAFAR. 1993. Pengkajian laju transfer paket teknologi petani dan dampak sosial ekonomi PIR-BUN kelapa sawit. Lokakarya Evaluasi Hasil Penelitian menunjang Agroindustri, Agribisnis, dana ARMP 1991/1992 di Balitran Bogor, 16 hal.
2. DASWIR dan L. BUANA. 1994. Dampak sistem organisasi petani terhadap teknologi. Laporan hasil penelitian ARMP 1993/1994, PPKS Medan, ex 9447, hal 136-142.
3. DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN dan PUSAT PENELITIAN KELAPA SAWIT. 1994. Statistik Perkebunan Indonesia 1992-1994. Kelapa Sawit, Medan. Inpress.
4. PORIM. 1993. Existing and potential oil palm areas in Peninsular Malaysia. Occasional paper No. 29 Des. 1993, Kuala Lumpur.
5. SINAR WIJAYA. 1993. Ketetapan-ketetapan MPR-RI 1993 dan GBHN 1993-1998 Sinar Wijaya, Surabaya.
6. WAHYONO, T. dan DASWIR. 1994. Proses pengembangan petani perkebunan rakyat kelapa sawit dengan alih teknologi. PPKS Medan, ex 9422, 12 hal.

oooOooo

